

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan (Setiawati dan Sari, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2003 dalam Adhi dan Suhardjo, 2013).

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik maka penerapan Permendagri No 24 tahun 2005 yang telah diganti dengan PP No 13 tahun 2006 maupun PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah dijalankan oleh sebagian besar pemerintah daerah. Untuk menyempurnakan sistem penyusunan laporan keuangan dengan mekanisme akuntansi yang ditetapkan dari dua aturan tersebut, maka pemerintah daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan PP No 17 tahun 2003.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 yang telah diganti dengan PP No 71 tahun 2010, yaitu menggunakan basis akrual. Basis akrual mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, sedangkan akun

pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas. Kondisi ini secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, agar akuntabilitas, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*) dapat tercapai (Setiawati dan Sari, 2014).

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Adriani, 2010).

Dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengihktisarkan dan melaporkan transaksi entitas baik peristiwa maupun kondisi untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankannya, agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tersedianya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari

pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Winindyaningrum dan Rahmawati, 2010). Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter (SAK, 2015). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (SAK, 2015).

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, bahwa aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau *human resource*). Manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organisasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi (Susanto, 2005).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang

mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga (Hevesi, 2005 dalam Setiawati dan Sari, 2014).

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan memperhatikan latar belakang dan masalah penelitian, penulis mereplik dari penelitian Setiawati dan Sari (2014) namun dengan menggunakan sampel yang berbeda yaitu Pemerintah Kota Madiun.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengajukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi, dan pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 2. Bagi Pembaca

Menambah referensi bacaan tentang pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi, dan pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bagian utama penulisan laporan skripsi terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian teori pelaporan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman akuntansi, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilam sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menyajikan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diperlukan.